

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

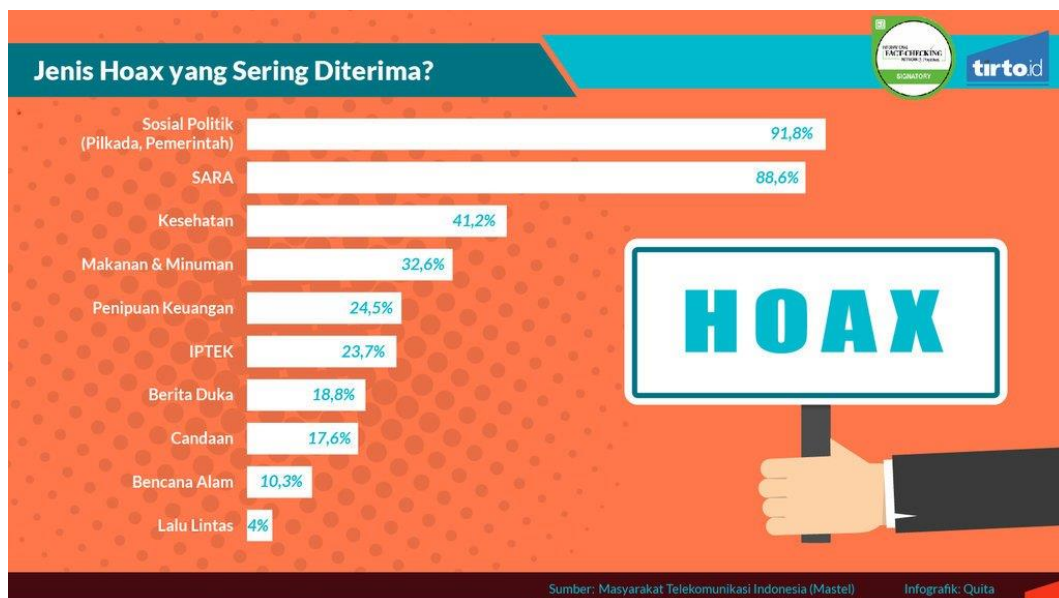
### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Sebagai pilar utama demokrasi, pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari negara demokrasi sebagai sarana yang tepat bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan memilih wakil-wakil terbaiknya di lembaga legislatif dan presiden/wakil presidennya. Pemilu yang merupakan bagian dari aktivitas politik telah menjadi fenomena tersendiri yang menarik perhatian masyarakat luas. Sejak era Reformasi, terhitung Indonesia sudah menggelar lima kali pemilu. Pelaksanaan pra-pemilu hingga pemilu tentunya tidak luput dari permasalahan-permasalahan yang muncul, hingga menyebabkan keributan dan kekerasan didalamnya. Pemilu presiden ke lima yang diselenggarakan pada tahun 2019 ini memiliki konstelasi politik yang lebih menyita perhatian publik, sebagaimana diketahui merupakan kedua kalinya calon presiden Joko Widodo atau yang biasa dipanggil Jokowi kembali berhadapan dengan calon presiden Prabowo Subianto untuk memperebutkan kursi presiden. Hal ini memunculkan dua kubu oposisi yang saling berseteru dalam upaya membela calon presiden pilihannya, salah satu permasalahan yang paling kompleks di era moderen pada pemilihan umum terakhir adalah maraknya berita palsu atau yang biasa disebut dengan Hoax di kalangan masyarakat.

Hoax dan Pemilu, kedua kata ini menjadi penting dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia sebab keduanya memiliki tautan dalam hal partisipasi pemilih dalam menentukan pilihan terbaik mereka. Di era moderen saat ini perkembangan teknologi informasi tentu memegang peranan penting yang diyakini membawa keuntungan dan kepentingan besar bagi negara-negara di dunia. Dengan berkembangnya teknologi informasi ini tentu memberikan dampak positif dimana perkembangan teknologi informasi mempercepat arus informasi ke seluruh penjuru di dunia, selain banyak dampak positif yang dihasilkan tentunya tidak luput dari dampak negatif yang ditimbulkan. Perkembangan teknologi pada zaman milenial seperti sekarang ini terkadang banyak di salah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab sehingga memberi dampak negatif terhadap ketertiban umum di

dalam kehidupan masyarakat (Siregar, 2018). Teknologi informasi dapat mengubah perilaku manusia, seperti kasus berita bohong hoaks yang sudah tidak asing lagi di kalangan masyarakat Indonesia. Ketergantungan masyarakat pada Internet (contoh: Facebook, Twitter, dll.) dan platform media sosial lainnya untuk mengakses informasi telah menyebabkan peningkatan konsumsi konten buatan masyarakat yang belum terverifikasi di media sosial, dengan mengorbankan media tradisional yang berbasis fakta. Media sosial telah bertindak sebagai akselerator, memaksimalkan penyebaran disinformasi saat berita palsu menjadi viral.

**Gambar 1. Jenis Hoax yang Sering Diterima Masyarakat**



Sumber : Tirto.id, 2018.

Dari data diatas dapat dilihat bahwa temuan hoax paling banyak di media sosial adalah mengenai Sosial Politik, termasuk pemilihan umum. Pada umumnya berita hoaks sengaja dibuat untuk menyebarkan propaganda fitnah atau pesan kebencian kepada seseorang atau instansi tertentu. Berita palsu merupakan fenomena yang terdiri dari kepalsuan dan bahkan informasi nyata yang disebarkan secara sengaja dan juga tidak sengaja untuk membingungkan masyarakat dimana di era globalisasi ini informasi dapat diakses dengan mudahnya di kalangan masyarakat namun sulit untuk diverifikasi. Berita hoaks mencakup suatu perbuatan yang bertujuan untuk menipu/membohongi orang lain dengan cara memanipulasi, mengakali, ataupun

Istya Geubrina Rizky, 2022

*UPAYA ASEAN FRAMEWORK TO MINIMISE THE HARMFUL EFFECTS OF FAKE NEWS DALAM MENANGANI BERITA PALSU PADA PRA-PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 2019*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

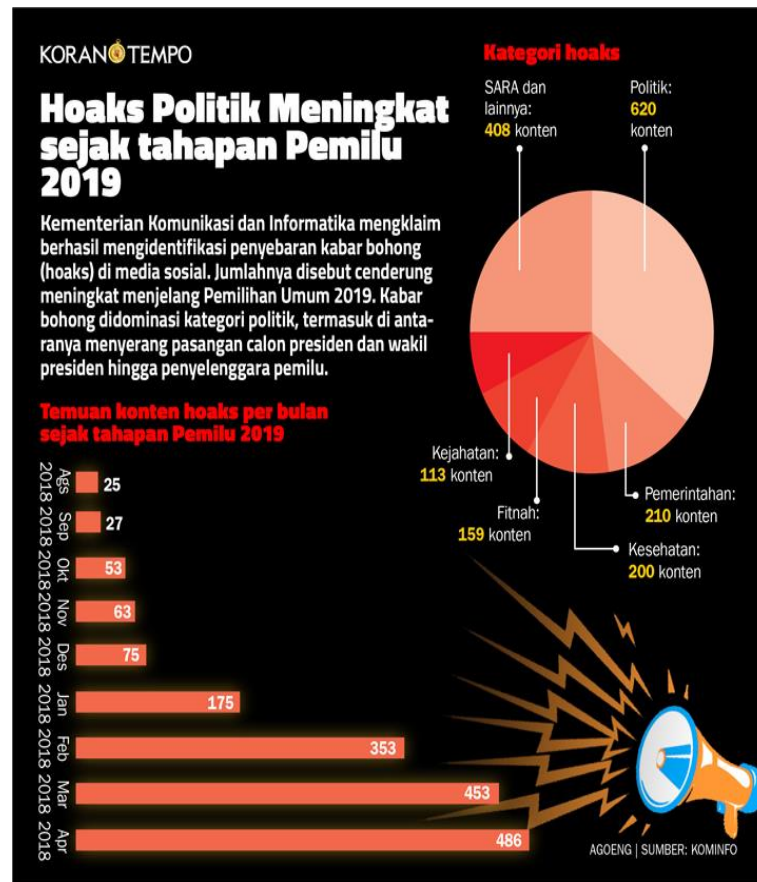
([www.Upnvj.ac.id](http://www.Upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)- [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) )

menutupi fakta yang sebenarnya (Irving, 2014). Menurut Rasywir & Purwarianti (2016) hoaks bermakna sebuah kebohongan atau informasi sesat yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, sedangkan berita hoaks adalah sebuah publikasi yang terlihat seperti berita faktual tetapi ternyata berisi kebohongan, fitnah, dan tidak memiliki pola yang dapat diidentifikasi.

Dibalik kemudahan akses informasi dan komunikasi tersebut terselip ancaman adanya *information disorder* atau yang dikenal dengan hoaks dan juga ujaran kebencian, melalui teknologi informasi dan komunikasi diciptakan dan dipropagandakan suatu skema rekayasa ketakutan (*fear engineering*) secara masal yang menargetkan pada rekayasa konflik (*conflict engineering*) dengan salah satunya menciptakan informasi hoaks maupun ujaran kebencian. Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia melaporkan terdapat lebih dari 700 hoax terkait pemilu pada Maret 2019. *Hoax* saat ini telah menjadi perbincangan hangat di media massa maupun media sosial karena telah meresahkan publik dengan informasi yang tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Penyebaran berita palsu meroket pada pekan terakhir menjelang pemilu presiden dan legislatif pada 17 April 2019. Berdasarkan data Masyarakat Anti-Fitnah Indonesia, berita palsu telah meningkat sebanyak 61% antara Desember tahun lalu dan Januari 2019. Sebagian besar hoax ditemukan di platform jejaring sosial Facebook. (MAFINDO, 2019). Hoaks politik antara lain berupa kabar bodong yang menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu, maupun penyelenggara pemilu. Kesukaan masyarakat pada berita *hoax* menurut hasil riset Kementerian Komunikasi dan Informatika, karena media *mainstream* tidak lagi berpihak kepada masyarakat, media *mainstream* kurang peka dalam menyerap aspirasi masyarakat luas, serta cenderung menjadi corong para pemilik media (Kominfo, 2019)b.

Gambar 2. Grafik Persentase Peningkatan Hoaks Politik Sejak Tahapan Pemilu 2019



Sumber : Koran Tempo.

Pengendalian berita palsu menjadi tantangan bagi pengguna media khususnya pemerintah sebagai lembaga pembuat kebijakan dalam memperoleh informasi terpercaya. Hal tersebut disebabkan oleh lanskap media berita telah berubah secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Saat ini telah terjadi peningkatan di media online dalam hal jurnalisme, media sosial, dan keterlibatan publik. Memeriksa berita secara online melalui sosial media, surat kabar, dan/atau situs media lokal telah menjadi kebiasaan masyarakat, terlebih berita *online* dapat diakses melalui *smartphone* dan aplikasi seluler, sehingga setiap orang dapat cepat mengikuti perkembangan berita di berbagai dunia dengan mudah. Seiring dengan meningkatnya penetrasi internet di ASEAN tidak diragukan lagi pergeseran pola konsumsi media yang serupa terjadi di ASEAN, salah satunya Indonesia.

Istya Geubrina Rizky, 2022

UPAYA ASEAN FRAMEWORK TO MINIMISE THE HARMFUL EFFECTS OF FAKE NEWS DALAM MENANGANI BERITA PALSU PADA PRA-PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA TAHUN 2019

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Hubungan Internasional

([www.Upnvj.ac.id](http://www.Upnvj.ac.id)-[www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id)- [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id) )

Dikutip dari website Safenet Voice, Di negara-negara seperti Filipina, Indonesia, dan Myanmar, disinformasi dan retorika kebencian secara online memiliki konsekuensi yang serius bagi opini publik. Para menteri dari masing-masing negara anggota ASEAN memahami bahwa di samping mendatangkan peluang, perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi dan media sosial tentu juga akan mendatangkan tantangan berupa munculnya informasi palsu (Suwiknyo, 2018).

Dalam menghadapi permasalahan berita palsu diperlukan kolaborasi untuk memerangi berita palsu yang salah satunya dapat terdiri dari interaksi regional. S. Iswaran, Menteri Komunikasi dan Informasi Singapura mengatakan bahwa berita palsu menjadi tantangan bagi semua negara. Negara-negara anggota ASEAN tampaknya mendukung pemerintah yang kuat dalam memerangi berita palsu (Schuldt, 2021). Untuk itu perlu kolaborasi dari para anggota ASEAN untuk memerangi berita bohong dan efek buruk lanjutannya, selain kolaborasi setiap negara juga harus bisa memastikan bahwa warga negaranya mampu memilih dan memilah informasi yang setiap hari diterima (Suwiknyo, 2018). Dikutip dari *ASEAN to Cooperate on Fighting Fake News in the Region (2017)*, entitas yang bekerja sama harus menyetujui aturan pelibatan, tindakan yang harus diambil dalam jangka waktu tertentu, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Berita palsu harus dilawan melalui upaya bersama di forum regional dan internasional untuk berbagi pengalaman dan berkolaborasi di bidang yang dapat diterima bersama. Melihat berita palsu yang semakin meluas dan menjadi perhatian, para Menteri ASEAN melakukan pertemuan meja bundar pada September 2017 oleh *ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI)* untuk menyiapkan panggung untuk kolaborasi regional.

Para Menteri ASEAN mendukung Kerangka dan Deklarasi Bersama untuk Meminimalkan Efek Berbahaya dari Berita Palsu yang akan memberikan kerangka acuan umum untuk Negara-negara anggota ASEAN untuk memperkuat kerja sama, berbagi ide, membangun diskusi agar anggota ASEAN dapat berbagi pengalaman dan praktik terhadap penanggulangan berita palsu, dampak sebagian, dan mengusulkan solusi yang langgeng untuk kepentingan masyarakat ASEAN. ASEAN menyepakati dokumen *Core Values on Digital Literacy* yang berisikan nilai-nilai utama yang perlu dimiliki masyarakat dalam era digital ini. Nilai-nilai tersebut antara lain adalah rasa tanggung jawab, empati, keaslian informasi, ketegasan dalam mengevaluasi informasi

serta integritas. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat membantu membimbing masyarakat ASEAN untuk lebih bijak dalam mengolah dan menyebarkan informasi.

Pertemuan juga telah menyepakati dokumen *Framework and Joint Declaration to Minimise the Harmful Effect of Fake News* untuk meminimalisasi efek sebagian dari *Fake News* di sebagian khususnya di tingkat masyarakat. Tindakan pencegahan terhadap berita palsu harus menghormati nasional kedaulatan dan peran sentral pemerintah, serta dilaksanakan secara nasional sesuai dengan keadaan politik dan sosial masing-masing negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang turut memerangi berita palsu didalam negaranya menjadikan *Framework* tersebut sebagai salah satu wadah yang tepat dalam memerangi berita palsu. Dikutip dari halaman resmi Sekretariat Nasional Asean – Indonesia (2018), melalui pertemuan *16<sup>th</sup>Senior Officials’ Meeting Responsible for Information (SOMRI)*, *14<sup>th</sup> ASEAN Ministers’ Meeting Responsible for Information (AMRI)* dan *Related Meetings* yang dilaksanakan di Singapura pada 7-11 Mei 2018 ini berfokus dalam memaksimalkan manfaat digitalisasi untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di kawasan serta membangun masyarakat ASEAN yang bertanggung jawab dalam berinformasi. Pertemuan antara lain membahas mengenai pentingnya meningkatkan *digital literacy* dan pencegahan penyebaran *fake news/hoax*, yang merupakan prioritas para Menteri ASEAN di bidang informasi.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berita palsu yang menjadi permasalahan utama pada pra pemilihan presiden 2019 menjadi perhatian pemerintah. Jika tidak dicegah dan ditanggulangi maka akan berdampak pada banyak aspek. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut tentu dibutuhkan kerjasama atau kolaborasi, maka dari itu Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya berkerjasama untuk memberantas berita palsu melalui ASEAN Frameworks to Minimise the Harmful Effects of Fakenews. Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan yang ada, penulis merumuskan pertanyaan penelitian yakni, “Bagaimana Upaya ASEAN Framework to Minimise the Harmful Effects of Fake News dalam Menangani Berita Palsu pada Pra-Pemilihan Presiden di Indonesia Tahun 2019?”.

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk memahami permasalahan berita palsu di Indonesia khususnya pada saat pra-pemilu tahun 2019 di Indonesia.
2. Untuk memahami upaya *ASEAN Frameworks to Minimise the Harmful Effect of Fakenews* dalam mencegah dan menangani maraknya berita palsu yang menjadi perhatian di Indonesia khususnya pada saat pra pemilihan presiden tahun 2019.
3. Untuk mengetahui Ke Efektifan Kerjasama *ASEAN Framework* bagi Indonesia dalam mencegah dan mengatasi maraknya berita palsu pada saat pra pemilu 2019.

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

#### **1. Manfaat akademis**

Diharapkan dapat mengembangkan ilmu Hubungan Internasional terutama pada isu-isu kontemporer terkait berita palsu yang semakin menjadi perhatian di Indonesia. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti lain yang memiliki perhatian yang sama.

#### **2. Manfaat praktis**

Diharapkan dapat menjadi masukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini, anggota ASEAN serta instansi atau lembaga yang menjadi sebag dalam penanganan berita palsu di Indonesia, agar lebih sadar akan kerugian yang diakibatkan berita bohong sangat banyak dan harus segera di tindak lanjuti.

### **I.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dan membantu pembaca penelitian ini untuk lebih memahami penelitian ini, maka penulis membagi sistematika penulisan penelitian menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya merupakan satu rangkaian susunan yang sama dan saling berkaitan satu sama lain hingga membentuk suatu penelitian. Berikut ini merupakan sistematika penulisan yang penulis gunakan, yaitu:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab I yakni Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini, berisikan mengenai penelitian-penelitian terdahulu sebagai referensi bacaan, kemudian terdapat konsep-konsep penelitian yang berkaitan dengan penelitian sebagai bahan pendukung skripsi yang sedang dikerjakan, teori penelitian, dan kerangka berfikir.

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini terdapat pembahasan mengenai metodologi penelitian yang akan digunakan oleh pebnulis dalam menjawab rumusan masalah, antara lain jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, teknik keabsahan data, serta waktu dan lokasi penelitian.

## **BAB IV PERSEBARAN BERITA PALSU DI INDONESIA DAN KERJASAMA ASEAN FRAMEWORK TO MININISE THE HARMFUL EFFECTS OF FAKENEWS**

Pada bab ini berisikan penjabaran akan peningkatan persebaran berita palsu di Indonesia pada saat Pra-pemilu tahun 2019. Lalu menjelaskan Kerjasama ASEAN *Frameworks to Minimise The Harmful Effect of Fakenews*.

## **BAB V UPAYA ASEAN FRAMEWORKS TO MINIMISE THE HARMFUL EFFECT OF FAKENEWS DALAM MENANGANI BERITA PALSU PADA PRA-PEMILU TAHUN 2019 DI INDONESIA**

Pada bab ini akan menganalisa upaya-upaya dari ASEAN *Frameworks to Minimise The Harmful Effect of Fakenews* dalam menangani permasalahan berita



palsu khususnya pada Pra-pemilu di Indonesia pada tahun 2019 dan hasil dari upaya Frameworks tersebut di Indonesia, efektif atau tidak efektif.

## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisikan mengenai kesimpulan akhir dari sebuah penelitian yang telah dilakukan, beserta saran yang diberikan sesuai dengan penelitian yang bersangkutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka Sebagian berisi referensi-referensi atau sumber-sumber yang dijadikan serta digunakan oleh penulis dalam melengkapi data-data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis